

BAB 7

PEMBAHASAN

7.1 Wacana Politik Habibie dan Upaya Produksi/Reproduksi Makna Publik

Telah dimaklumi bahwa wacana (*discourse*), termasuk wacana politik (*political discourse*) tidak lagi sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan atau menjelaskan fenomena natural atau sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memproduksi dan mereproduksi makna oleh subjek (-subjek) untuk kepentingan tertentu. Pemahaman ini didasarkan oleh kenyataan bahwa makna dalam wacana tidak pernah netral dari kepentingan subjek. Wacana selalu bermuatan makna sesuai dengan “kemauan” subjek, walaupun dalam proses pembentukannya “subjek tidak senantiasa menyadari sepenuhnya atau tidak dalam pengendalian mutlak atas apa yang mereka lakukan”.²⁸⁷

Wacana politik yang dibangun Habibie pun selalu bermuatan kepentingan dan kemauan Habibie. Ketika ia menyampaikan tema *agenda reformasi menyeluruh*, misalnya, ia ingin memahamkan makna kepada publik bahwa agenda ini memang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat. Oleh karena

²⁸⁷ Lihat Muhammad A.S. Hikam, “Bahasa, Politik dan Penghampiran ‘Discursive Practice’: Sebuah Pengantar”, dalam *Driyarkara* No. 2, Tahun XX, 1993/1994, hlm. 54-72.

tisasi mereka sejak semula.” Dengan demikian, jelaslah bahwa makna suatu wacana amat ditentukan oleh realitas konteks yang mengiringinya, tetapi bukan sebaliknya.

Dikatakan pula bahwa wacana merupakan kaitan yang rumit antara tanda-tanda dan praksis yang, pada gilirannya, mengatur eksistensi dan reproduksi sosial. Wacana bisa memberikan perbedaan-perbedaan substansial terhadap individu-individu sebagai anggota suatu kelompok, kelas sosial, atau himpunan-himpunan sosial lainnya. Proposisi ini juga bisa dibuktikan dalam wacana politik Habibie. Ketika Habibie mengungkapkan tema-tema dalam wacana politiknya, selalu ada *pro* dan *kontra*, walaupun secara kuantitas, pihak yang *pro* selalu lebih sedikit dibanding dengan pihak yang *kontra*. Setelah diamati, yang *pro* (yaitu yang selalu mendukung makna setiap tema yang diungkapkan Habibie) adalah pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempunyai alur “kesejarahan” dengan Habibie; sedangkan yang *kontra* (yaitu yang menolak makna setiap tema yang diungkapkan Habibie) adalah pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang tidak mempunyai alur “kesejarahan”, bahkan mungkin selalu berseberangan, dengan Habibie. Misalnya, ketika Habibie mengagendakan *percepatan SI MPR*, pendukung utamanya adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sebagai kelompok yang pernah dipimpin oleh Habibie. Sebaliknya, penolak utamanya adalah

Barisan Nasional (Barnas), sebagai kelompok yang selalu berseberangan dengan Habibie karena kelompok ini selain pernah dicap “makar” oleh Habibie, juga mempunyai kersejaraan yang tidak manis dengan Orde Baru. Bahkan, Barnas menganggap bahwa Habibie sebagai kepanjangan tangan Orde Baru, khususnya Soeharto. Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap wacana yang dibangun oleh elite bisa memunculkan rasa kebersamaan (bagi kelompok yang mempunyai alur kesejaraan dengan elite yang bersangkutan) dan sekaligus memunculkan rasa perbedaan (bagi kelompok yang sejak semula berseberangan dengan elite yang bersangkutan). Oleh karena itu, tepatlah yang dikatakan Terdiman²⁹⁰ bahwa wacana bisa berperan sebagai perantara bagi pembentukan rasa kebersamaan sesama anggota dan rasa perbedaan dengan kelompok lain.

Pada sisi lain, “kemauan” dan “kepentingan” subjek dalam wacana politik lebih terasa bila dibanding dengan wacana lain. Sebab, produksi dan reproduksi makna dalam wacana politik lebih ditentukan oleh kuasa-kuasa²⁹¹ yang bermain dalam kehidupan politik pada masanya. Oleh karena itu, kata Shapiro,²⁹² wacana politik merupakan “representasi dalam dirinya sendiri

²⁹⁰ Lihat Terdiman, R., *Discourse/Counter-discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France* (Ithaca: Cornell University Press, 1987), hlm. 54.

²⁹¹ Oleh Foucault, kuasa (*power*) tidak hanya menyiratkan arti negatif, tetapi juga dalam pengertian positif, yaitu elemen produktif dalam batang tubuh kehidupan sosial-politik.

²⁹² Lihat Shapiro, M., *Language and Political Understanding: The Politics of Discursive Practices* (New Haven: Yale University, 1981), hlm. 140.

dari hubungan-hubungan politis” dan merupakan ruang bagi penggelaran kuasa-kuasa tertentu. Bagaimana kaitan proposisi ini dengan wacana politik Habibie? Wacana politik yang dibangun Habibie pun tidak lepas dari kemauan dan kepentingan Habibie. Dalam posisinya sebagai penguasa yang bermain dalam kehidupan politik, kemauan dan kepentingan Habibie ini selalu dikemas dalam tema-tema yang diungkapkan kepada publik dalam berbagai kesempatan. Ketika mengungkapkan tema *penyelesaian kasus Timor Timur*, misalnya, Habibie dengan leluasa menentukan langkah-langkah pendukungnya. Untuk kepentingan ‘peningkatan citra diri di dunia internasional’ ini, Habibie dengan luluasa memaknakan *penyelesaian kasus Timor Timur* dengan memberikan kesempatan jajak pendapat kepada rakyat Timtim dengan dua opsi yang cukup fatal bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu *opsi 1* (tentang status khusus dengan otonomi luas) dan *opsi 2* (tentang pelepasan Timor Timur). Padahal, memaknakan penyelesaian Timor Timur dengan memberikan dua opsi (lewat jajak pendapat) bagi rakyat Timor Timur, sangat ditentang oleh publik. Tetapi, karena pada saat itu (era pemerintahan transisi) Habibie sedang “menguasai ruang” dalam penggelaran “kekuasaan”, apa pun kadar kontroversinya, Habibie tetap bisa memaksakan kehendaknya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa wacana politik amat diwarnai oleh peran yang dimainkan oleh kuasa-kuasa yang

ada di dalamnya.²⁹³ Bahkan, secara lebih spesifik, Hikam²⁹⁴ menyatakan bahwa kuasa dianggap senantiasa berada dalam setiap proses wacana dan ia memberikan batasan-batasan tentang apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai di dalamnya, topik apa yang dibicarakan, dan norma-norma serta elaborasi konsep-konsep dan teori-teori apa yang bisa dan sah untuk dipakai. Dari sini jelas bahwa wacana politik senantiasa terlibat dalam hubungan-hubungan kekuasaan dan berbagai macam tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan yang diperankan Habibie berkaitan dengan wacana politiknya? Peran kekuasaan yang dimainkan Habibie selalu dikaitkan dengan tema-tema yang sedang dibangunnya. Cara ini, selain dimaksudkan sebagai konteks pendukung terhadap tema tertentu, juga dimaksudkan sebagai pemaknaan atas tema yang sedang dibangunnya. Oleh karena itu, lewat pengamatan terhadap peran-peran yang dimainkan Habibie, bisa diketahui "muatan politik"²⁹⁵ apa yang ada di dalamnya. Misalnya, ketika berupaya membangun tema *keterbukaan* lewat berbagai pernyataannya di berbagai forum, Habibie juga melakukan serangkaian perannya berupa, antara lain: mengadakan pertemuan dengan tokoh oposisi, mengada-

²⁹³ Bandingkan Muhammad A.S. Hikam, "Bahasa, Politik dan Penghampiran 'Discursive Practice': Sebuah Pengantar", dalam *Driyarkara* No. 2, Tahun XX, 1993/1994, hlm. 54-72.

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ "Muatan politik" dalam peran yang dimainkan oleh penguasa ini biasa disebut dengan "makna".

kan pertemuan dengan para orangtua dan keluarga dari para mahasiswa korban 12 Mei 1998, dan melakukan pertemuan dengan para pemimpin media massa. Dari peran-peran yang dimainkan tersebut telah diketahui makna atau muatan politisnya, yaitu Habibie adalah sosok pemimpin yang *committed* dengan keterbukaan, walaupun sebagian besar pihak masih juga meragukannya. Pemahaman wacana politik lewat pendekatan *discursive-practice* semacam ini, sesuai dengan pendapat Shapiro²⁹⁶ yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap 'nilai' dalam suatu wacana politik pada dasarnya adalah upaya mewaspadaikan muatan-muatan politik yang terpisah-pisah pada subjek dan jenis-jenisnya, pada objek-objek wacana, serta hubungan-hubungan yang berkaitan ketika melakukan transaksi wacana berlangsung. Dengan demikian, pemahaman wacana politik lewat pendekatan *discursive-practice* ini bisa membongkar setiap upaya pengendalian wacana dalam praksis kebahasaan oleh subjek (-subjek) yang berkepentingan, makna-makna yang dimaksudkan, dan konteks-konteks pendukungnya.

Yang patut juga diperhatikan berkaitan dengan upaya penyingkapan muatan politik pada setiap peran yang dimainkan oleh Habibie adalah adanya hubungan yang rumit antara tema yang diungkapkan dan peran yang

²⁹⁶ Dalam Muhammad A.S. Hikam, "Bahasa, Politik dan Penghampiran 'Discursive Practice': Sebuah Pengantar", dalam *Driyarkara* No. 2, Tahun XX, 1993/1994, hlm. 54-72.

dimainkan. Kerumitan hubungan ini dibuktikan dengan beberapa fenomena berikut. *Pertama*, tema yang diungkapkan Habibie dalam suatu teks selalu berhubungan dengan tema lain, walaupun bisa dilihat tema mana yang paling ditonjolkan. Misalnya, teks pidato politik Habibie yang disampaikan setelah pengangkatannya sebagai presiden (21 Mei 1998) berisi beberapa tema, walaupun tema yang menonjol adalah “agenda reformasi menyeluruh”.

Kedua, setiap tema yang dibangun Habibie tidak diungkapkan dalam satu teks, tetapi diungkapkan dalam beberapa teks dalam berbagai kesempatan.

Sehingga, ide-ide pendukungnya pun juga bertebaran dalam berbagai teks.

Misalnya, upaya penciptaan tema *pemberantasan KKN* tidak saja diungkapkan Habibie ketika menyampaikan pidato politiknya pada 21 Mei 1998, tetapi juga diungkapkan ketika bersilaturahmi dengan para rektor perguruan tinggi se-Indonesia (4 Juni 1998), ketika mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa (6 Juni 1998), dan ketika memberikan berpidato dalam rangka menyambut HUT RI ke-54 (16 Agustus 1999). *Ketiga*, peran-peran yang dimainkan Habibie dalam rangka mendukung konteks atas tema yang dibangunnya diterapkan dalam berbagai macam bentuk, baik berupa tindakan langsung dan spontan, kebijakan yang terprogram, maupun berupa sikap. Misalnya, tindakan Habibie membebaskan para tapol dan napol merupakan penciptaan konteks untuk mendukung tema *penegakan HAM*.

Kebijakan Habibie memberikan kredit bergulir kepada rakyat yang berekonomi lemah (lewat program Jaring Pengaman Sosial) merupakan penciptaan konteks untuk mendukung tema *mengatasi krisis ekonomi* yang menekankan pada program ekonomi kerakyatan. Sikap Habibie yang memberikan dukungan kepada mahasiswa yang berdemo secara konstitusional dan tidak anarkhis merupakan konteks yang mendukung tema *keterbukaan* yang berkonsentrasi pada menjunjung tinggi hak berpendapat. Keempat, peran-peran yang dimainkan Habibie tidak selalu merujuk dan mendukung pada satu tema tertentu, tetapi bisa lebih dari satu tema. Hal ini karena peran yang sedang dimainkan lebih makro ketimbang tema yang sedang dirujuk. Misalnya, kebijakan Habibie membentuk Tim Lima untuk mengusut secara tuntas atas pelecehan seksual pada peristiwa 13-14 Mei 1998, merupakan konteks yang bisa mendukung tema *penegakan HAM* dan *keterbukaan*. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang rumit antara tema yang dibangun Habibie dengan peran yang dimainkannya ketika ia menjalankan kekuasaannya sebagai presiden.

7.2 Wacana Politik Habibie dan Upaya Pemerolehan Legitimasi Kekuasaan

Dalam praktiknya, persoalan *legitimasi* selalu bertautan dengan persoalan *kekuasaan* dan *wewenang*, karena ketiganya menyangkut hubungan antara

pemimpin dan yang dipimpin. Apabila *kekuasaan* mempersoalkan kemampuan pemimpin (baca: pemerintah) dalam penggunaan sumber-sumber yang bisa mempengaruhi proses politik; *kewenangan* mempersoalkan hak moral pemimpin dalam penggunaan sumber-sumber untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (hak memerintah); maka *legitimasi* mempersoalkan bagaimana penerimaan dan pengakuan yang dipimpin (baca: rakyat) terhadap hak pemimpin.²⁹⁷ Oleh karena itu, analisis terhadap legitimasi kekuasaan mengarahkan perhatian pada sikap rakyat atas kewenangan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politiknya. Apabila rakyat menerima atau mengakui hak moral atau kewenangan pemerintah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politiknya, maka berarti pemerintah telah mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Sebaliknya, apabila rakyat tidak menerima atau tidak mengakui hak moral atau kewenangan pemerintah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politiknya, berarti pemerintah tidak mendapatkan legitimasi dari rakyatnya.

Bagaimana legitimasi kekuasaan Habibie dalam kapasitasnya sebagai presiden pada “pemerintahan transisi”? Sebagaimana dimaklumi bahwa pengangkatan Habibie sebagai presiden menimbulkan kontroversi yang amat kuat dari berbagai kalangan. Kontroversi yang mengarah pada polari-

²⁹⁷ Lihat uraian Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 92.

sasi *pro* dan *kontra* ini terus berlanjut sepanjang pemerintahan transisi sehingga berimbas pada peran-peran kekuasaan yang dimainkan Habibie dan hak moral untuk mengatur pemerintahannya, yang ujung-ujungnya juga berimbas pada kadar legitimasi kekuasaannya. Kondisi ini tentu memacu Habibie untuk secara maksimal berupaya mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat lewat pembangunan wacana politik. Sebab, hanya dengan mendapatkan legitimasi kekuasaan secara totallah, ia dapat secara maksimal pula memerankan kekuasaannya dan mendapatkan hak moral mengatur pemerintahannya.

Berdasarkan data yang terungkap, minimal ada tiga jenis upaya pembangunan wacana politik yang dilakukan Habibie untuk mendapatkan legitimasi kekuasaannya. *Pertama*, melakukan komunikasi politik dengan rakyat atau pihak-pihak yang dianggap mewakili kelompok tertentu di masyarakat, baik yang *pro* maupun yang *kontra*. Komunikasi politik ini diarahkan pada pemberian pemahaman atas tema-tema tertentu yang dapat mendukung wacana politiknya. *Kedua*, mengagendakan percepatan pelaksanaan SI dan pemilu. SI MPR difokuskan pada pembahasan berbagai isu sentral yang berkembang di masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam ketetapan-ketetapan yang dapat dipakai sebagai pedoman presiden untuk melaksanakan agenda reformasi menyeluruh yang konstitusional. Lewat pemilu yang *luber* dan

jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil) diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat di DPR/MPR yang bisa membawa aspirasi rakyat, sehingga yang dihasilkannya pun (presiden dan wakil presiden terpilih) bisa dibenarkan oleh rakyat. *Ketiga*, melaksanakan program-program populis, misalnya memberikan pinjaman kredit lunak kepada petani lewat KUT, memberikan bantuan kepada rakyat miskin lewat JPS, memberikan peluang padat karya kepada para penganggur sebagai dampak krisis moneter yang berkepanjangan.

Serangkaian upaya yang dilakukan Habibie untuk memperoleh legitimasi kekuasaan tersebut tidak berbeda dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan legitimasi kekuasaan dari rakyat, pemimpin pemerintahan bisa melakukan tiga jenis cara, yaitu cara simbolis, cara prosedural, dan cara material. Upaya pencarian legitimasi kekuasaan lewat cara *simbolis* dilakukan dengan memanipulasi kecenderungan-kecenderunagn moral, emosional, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya ada umumnya dalam bentuk simbol-simbol, baik bersifat ritualistik, sakral, retorik, maupun mercusuar.²⁹⁸ Dari sekian banyak implementasi dari cara simbolis ini, Habibie lebih memfokuskan pada penggunaan komunikasi politik. Hal ini bisa dimaklumi karena selain lebih efektif dan efi-

²⁹⁸ Lihat Ramlan Surbakti. *Opcit*, hlm. 93

sien, penggunaan komunikasi politik ini bisa 'menggiring' emosi dan pikiran rakyat ke arah pembangunan makna dan opini yang dikehendaki Habibie dari berbagai isu dan fenomena yang sedang berkembang. Hanya saja, sebagian besar upaya 'penggiringan' lewat komunikasi politik yang dilakukan Habibie ini gagal karena konteks pengiringnya tidak atau kurang bisa mendukungnya.

Upaya pencarian legitimasi kekuasaan lewat cara *prosedural* dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi negara, atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.²⁹⁹ Cara ini juga ditempuh Habibie. Bahkan, yang diagendakan tidak hanya pemilu, tetapi juga SI MPR. Harapan Habibie, dengan penyelenggaraan SI MPR dan pemilu ini posisi Habibie sebagai presiden dapat terlegitimasikan. Hanya saja, upaya Habibie dengan cara *prosedural* ini pun gagal karena agenda SI MPR pola Habibie tidak sesuai dengan agenda SI MPR yang diinginkan publik. Publik menghendaki SI MPR mengagendakan pemilihan presiden pengganti Soeharto atau – setidaknya – pembentukan Dewan Reformasi yang memandu pejabat presiden melaksanakan agenda reformasi selama pemerintahan transisi. Akibatnya, agenda SI MPR yang dimaksudkan untuk meman-

²⁹⁹ Ibid.

tapkan langkah Habibie dalam mengatur pemerintahan, justru berbalik sebagai pemicu kerusuhan di mana-mana yang dimotori oleh mahasiswa dan kelompok oposisi.

Upaya ketiga, yaitu pencarian legitimasi kekuasaan lewat cara *material* dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan kesejahteraan material kepada rakyat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana komunikasi dan transportasi, sarana produksi, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan sebagainya.³⁰⁰ Cara ini pun ditempuh Habibie lewat melakukan kebijakan yang populis. Lewat penggalakan program KUT bagi petani, program JPS bagi rakyat miskin, dan program padat karya bagi para penganggur, Habibie berharap mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Namun, usaha Habibie ini ternyata masih tidak bisa mengangkat persoalan penderitaan rakyat, karena krisis ekonomi terus berkepanjangan. Harga kebutuhan petani terus melonjak, sementara harga hasil pertanian tidak menentu. Harga kebutuhan pokok terus melonjak yang dibarengi dengan kelangkaan persediaan barang. Nilai rupiah atas dolar Amerika terus melemah sebagai akibat ketidakpercayaan dunia usaha atas kondisi Indonesia. Akibatnya, harapan Habibie untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat tetap gagal.

³⁰⁰ Ibid.

Ketiga cara tersebut dilakukan secara simultan oleh Habibie, agar legitimasi kekuasaan dari rakyat semakin cepat tercapai. Namun, karena sejak semula legalitas pengangkatan Habibie dipermasalahkan oleh berbagai kalangan, maka upaya apa pun yang dilakukan Habibie dan konteks penunjang apa pun tidak akan mendapatkan dukungan dari publik. Akibat lebih lanjut dari kondisi yang demikian adalah roda pemerintahan Habibie berjalan secara tidak fungsional.

Sebagai bagian dari sistem politik, apabila suatu pemerintahan berjalan secara tidak fungsional, akan berpengaruh pula pada sistem politik secara keseluruhan. Sehubungan dengan sistem politik ini, Andrain³⁰¹ menyebutkan ada lima objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional, yaitu komunitas politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Kelima objek ini mempunyai hubungan yang kumulatif dan hierarkis. Artinya, apabila objek tertentu tidak mendapatkan dukungan dari rakyat, maka objek-objek yang lain juga tidak mendapatkan dukungan. Begitu juga sebaliknya, jika objek tertentu mendapatkan dukungan, maka objek yang lain pun akan mendapatkan dukungan. Berdasarkan tesis Andrain tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: karena Habibie (sebagai pemimpin politik) tidak mendapat-

³⁰¹ Ibid.

kan legitimasi dari rakyat, maka komunitas politik, hukum, lembaga politik, dan kebijakan-kebijakannya pun tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Permasalahan berikutnya adalah mengapa Habibie tidak mendapatkan legitimasi kekuasaan rakyat -- alih-alih disebut mengalami krisis legitimasi? Berkaitan dengan krisis legitimasi ini, Lucyan Pye³⁰² menyebutkan empat hal yang menyebabkannya. *Pertama*, prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Hal ini terjadi karena prinsip kewenangan yang selama ini digunakan tidak diakui oleh masyarakat, dan masyarakat sudah menemukan prinsip kewenangan baru yang dianggapnya lebih baik. *Kedua*, adanya persaingan yang sangat tajam dan tidak sehat di antara tubuh pemerintahan. Persaingan ini bisa mengakibatkan kelumpuhan pemerintah sehingga masyarakat tidak menaati kewenangan yang ada. *Ketiga*, pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan dalam masyarakat. Kekecewaan ini bisa mengakibatkan mudurnya dukungan kepada pemerintah. *Keempat*, sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan sehingga masyarakat meragukannya. Keraguan ini timbul karena sosialisasi yang diterapkan tidak sesuai dengan atau menyimpang dari aspirasi yang hidup di masyarakat. Empat sebab munculnya krisis legitimasi yang dikemukakan oleh Lucyan Pye tersebut ternyata juga menja-

³⁰² Ibid, hlm 99.

di sebab dari munculnya krisis legitimasi pada diri Habibie selama menjadi presiden pada pemerintahan transisi. *Pertama*, kewenangan Habibie sebagai presiden tidak diakui oleh publik karena proses pengangkatan Habibie yang dianggap tidak sah. Publik menghendaki kewenangan presiden dialihkan pada Dewan Reformasi yang dibentuk oleh MPR sebagai hasil SI. *Kedua*, walaupun persaingan yang tajam di tubuh pemerintahan transisi tidak ada, tetapi persaingan terjadi di kelompok oposisi. Begitu kuatnya tekanan dari kelompok oposisi, sehingga apa yang diaspirasikan oleh kelompok oposisi selalu didukung oleh rakyat, padahal aspirasi mereka selalu bertentangan dengan kehendak Habibie. Akibatnya, dukungan rakyat kepada Habibie melemah dengan sendirinya. *Ketiga*, serangkaian janji Habibie kepada rakyat tidak terpenuhi, misalnya tentang pengusutan kasus KKN Soeharto dan kroninya, penungkapan kasus HAM, dan pemulihan krisis ekonomi. Akibatnya, rakyat tidak percaya lagi atas janji-janji yang disampaikan Habibie. *Keempat*, upaya sosialisasi mulai dari pencangan agenda reformasi menyeluruh sampai dengan penyelesaian Timor Timur tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, apa yang disampaikan Habibie hanyalah "isapan jempol" belaka, dan tidak "tidak didengar" oleh rakyat sebagaimana yang dikehendaki Habibie.

Keempat sebab yang mengakibatkan krisis legitimasi kekuasaan terse-

but merupakan faktor yang menampak semasa pemerintahan Habibie. Kata Lucyan Pye, hal ini memang sering terjadi pada masa transisi atau masa perubahan pada bidang-bidang kehidupan sosial, yang diikuti dengan perubahan aspirasi masyarakat. Sementara itu, pemerintah yang sedang berkuasaan kurang dapat menyerap aspirasi masyarakat yang telah berubah tersebut. Propossi Lucyan Pye ini pun rupaya bisa diterima ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa munculnya krisis legitimasi kekuasaan pada diri Habibie ini juga bersamaan dengan kondisi transisional pada pemerintahan Habibie, sebagai awal dari era reformasi.

7.3 Wacana Politik Habibie dan Komunikasi Politik

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2: Kajian Teoretik bahwa komunikasi politik berkaitan dengan pertukaran simbol atau pesan yang terbentuk dari atau diakibatkan oleh sistem politik.³⁰³ Pada sisi lain, cakupan komunikasi politik terdiri atas komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat komunikasi politik.³⁰⁴ Dari sisi realitasnya, fenomena komunikasi politik ini dapat dilihat dari dua arah. *Pertama*, bagaimana institusi-institusi

³⁰³ Lihat uraian R.B. Meadow dalam *Politics as Communications* (Norwodd: ABLEX Publishing, 1980).

³⁰⁴ Dalam Dan Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in America* (Santa Monica: Goodyear, 1978), hlm. 7.

negara dan pemerintah yang bersifat formal (sebagai suprastruktur politik) menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. *Kedua*, bagaimana publik (sebagai infrastruktur politik) merespons dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.³⁰⁵ Dalam praktiknya, kedua struktur politik tersebut berhubungan secara “reciprocal”. Dengan kekuasaan dan wewenangnya, negara dan pemerintah (sebagai suprastruktur) senantiasa memberikan inisiatif yang berupa dorongan, gerakan, dan pola-pola perubahan (sesuai yang diharapkan) yang diarahkan pada semua lapisan masyarakat (sebagai infrastruktur) lewat komunikasi politik. Pada saat yang bersamaan, infrastruktur memberikan reaksi atau respons atas pesan yang disampaikan suprastruktur. Atas reaksi atau respons infrastruktur ini, suprastruktur memberikan pesan kedua sebagai penguatan (*reinforcement*) terhadap pesan pertama. Aksi-reaksi antara supra dan infrastruktur ini terjadi secara timbal balik yang tidak berkesudahan dalam komunikasi politik.

Bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Habibie? Sebagai sarana pembangunan wacana politik, realitas komunikasi politik Habibie bisa disiasati lewat panduan teoretik di atas, yaitu dari segi cakupan dan arah komunikasi. Dari segi cakupannya, komunikasi politik Habibie bisa dideskripsikan lewat variabel komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media ko-

³⁰⁵ Lihat Michael Schudson, “Sending a Political Message: Lessons from the American 1790s”, dalam *Media, Culture, and Society*, 19, 3 (1997), hlm. 311.

munikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat komunikasi politik. Sebagai *komunikator politik*, Habibie merupakan tokoh yang diperdebatkan ketika ia mendapatkan pelimpahan jabatan presiden. Perdebatan pro dan kontra ini dipacu oleh dua hal yang mendasar, yaitu prosedur pelimpahan jabatan presiden dan dengan sosok Habibie yang dianggap seaspirasi dengan presiden sebelumnya (Soeharto). Akibat penilaian dan *image publik* yang negatif itulah, komunikasi politik yang dilakukan Habibie sebagai sarana pembangunan wacana politiknya mengalami kebuntuan. Dari variabel *pesan politik*, komunikasi politik menyampaikan pesan-pesan politik yang dikemas dalam berbagai tema, yaitu tema agenda reformasi menyeluruh, percepatan pemilu, pemberantasan KKN, keterbukaan, penegakan HAM, penyelesaian Timor Timur, mengatasi krisis ekonomi, dan agenda sidang istimewa MPR. Kedelapan tema yang merupakan pesan politik Habibie ini kurang bahkan tidak mendapatkan dukungan publik. Hal ini terjadi karena konteks pendukungnya tidak menunjang pada setiap tema yang disampaikan. Akibatnya, pesan-pesan yang disampaikan Habibie dalam komunikasi politiknya pun tidak tercapai. Dari variabel *persuasi politik*, komunikasi politik Habibie menggunakan berbagai bentuk persuasi, mulai dari pemberian harapan dan janji kepada publik untuk peningkatan kesejahteraan sampai dengan ketekatan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang meresahkan

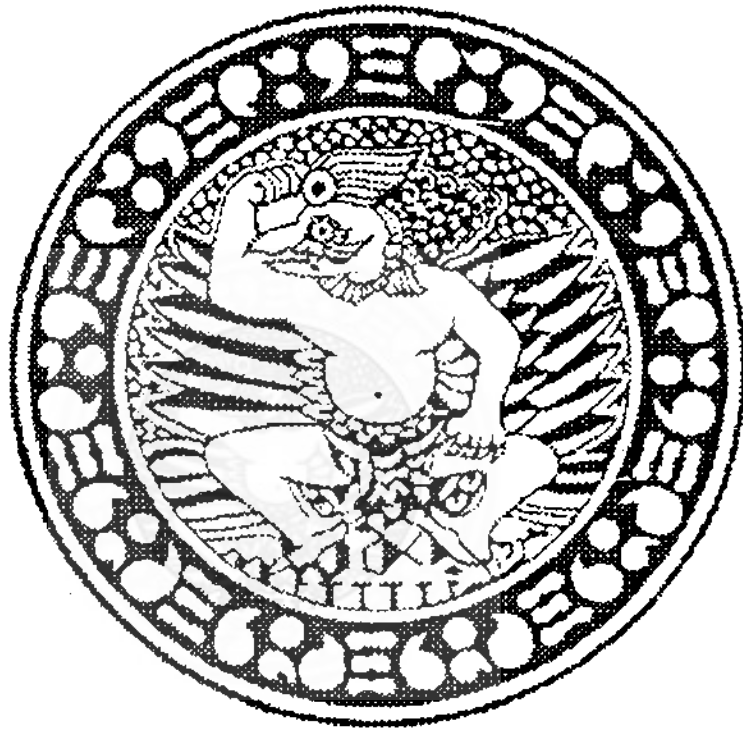
publik. Sayangnya, persuasi politik ini pun tidak mendapatkan sambutan dari publik karena kredibilitas Habibie masih disangsikan publik. Dari variabel *media komunikasi politik*, Habibie menggunakan berbagai media untuk menyampaikan komunikasi politiknya, mulai dari pemanfaatan media massa, berdialog di berbagai forum, sampai dengan berpidato di forum resmi kenegaraan. Dari berbagai media yang dimanfaatkan tersebut, belum ada satu pun media yang paling efektif untuk menyampaikan komunikasi politiknya. Hal terbukti bahwa dari sekian banyak media yang digunakan, tujuan komunikasi politik Habibie belum juga tercapai. Dari variabel *khalayak komunikasi politik*, Habibie pada umumnya mengarahkan sasaran komunikasi politiknya kepada massa rakyat, khususnya kelompok-kelompok yang bersebarangan dengannya. Apabila tema yang diungkapkan berkaitan dengan kesejahteraan umum dan permasalahan politik pada umumnya, maka sasarannya adalah semua massa rakyat. Tetapi, apabila tema yang disampaikan bersifat kasus, sasarannya pun diarahkan pada kelompok yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya, ketika memahamkan tema penyelesaian kasus Timor Timur, Habibie mengarahkan sasarannya kepada rakyat Timor Timur. Namun, ketika tema penyelesaian Timor Timur diangkat lebih makro lagi, misalnya dalam rangka "kebebasan", maka sasarannya adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terakhir, berdasarkan variabel *akibat-akibat komuni-*

kasi politik, komunikasi politik yang disampaikan Habibie ternyata menimbulkan dampak tertentu pada publik. Misalnya, ketika Habibie menyatakan perlunya percepatan SI, kelompok oposisi menyatakan penolakannya. Bahkan, dengan terang-terangan 16 tokoh vokal mengeluarkan Komunike Bersama dalam bentuk Deklarasi Nasional, yang intinya menolak dengan keras pelaksanaan SI pola Habibie ini. Begitu juga, ketika Habibie mengangkat tema pemberantasan KKN, ditanggapi publik secara sinis dan pesimis. Sebab, ungkapan Habibie tersebut dianggap sebagai *lips service* semata, dan diyakini sebagai upaya yang setengah hati.

Bertitik-tolak dari deskripsi pada aspek-aspek komunikasi di atas tergambar juga bagaimana relasi komunikasi politik antara Habibie (selaku suprastruktur) dan publik atau rakyat (selaku infrastruktur). Secara umum, setiap Habibie menyampaikan pesan politik yang dikemas dalam tema-tema tertentu yang diarahkan kepada publik, selalu direspons balik oleh publik. Hanya saja, respons yang disampaikan publik pada umumnya tidak sesuai dengan harapan Habibie, bahkan bersifat kontra produktif. Hubungan komunikasi politik antara Habibie dan rakyat yang mengalami distorsi dan “tidak sambung” ini disebabkan oleh berbagai faktor. Selain sejak awal kedudukan Habibie sebagai presiden diperdebatkan, Habibie sendiri kurang bisa menyerap dengan baik aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama

aspirasi yang berupa tuntutan perubahan yang mendasar sebagai konsekuensi era reformasi. Pada sisi lain, era reformasi ini dibarengi dengan *euphoria* politik oleh sebagian besar rakyat, yang dimanifestasikan dalam bentuk 'kebebasan tanpa batas'. Akibatnya, peran-peran kekuasaan Habibie dalam pemerintahan transisi terasa tidak berdaya menghadapi rakyat yang sudah "lepas kendali" dan tidak mau terkekang ini.





BAB 8

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta merujuk pada rumusan masalah yang terhimpun dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Selama 512 hari Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia III, mulai dari pengucapan sumpah di hadapan Mahkamah Agung pada 21 Mei 1998 sampai dengan Pidato Pertanggungjawabannya di hadapan MPR pada 14 Oktober 1999, penuh dengan kontroversi. Kontroversi yang dimaksud, mulai dari isu sah tidaknya Habibie diangkat sebagai presiden, sosok Habibie yang dianggap sebagai penerus *status quo*, sampai dengan isu rentannya Habibie memimpin pemerintahan. Isu-isu mendasar yang bisa mengarah ke krisis legitimasi ini membuat Habibie lebih getol untuk mempertahankan kedudukannya -- alih-alih untuk memantapkan legitimasinya. Salah satu upaya yang dilakukan Habibie adalah membangun wacana politik lewat pengangkatan serangkaian tema sebagai isu sentral yang dikomunikasi-

kan dalam berbagai kesempatan, yang ditujukan kepada publik. Pemunculan isu-isu sentral semacam ini dimaksudkan untuk menciptakan atau memahami makna tertentu kepada publik.

Pada kenyataannya, tema-tema yang dibangun Habibie, sebagai pendukung wacana politiknya, kurang, bahkan tidak, mendapatkan dukungan rakyat. Akibatnya, upaya produksi dan reproduksi makna publik yang dilakukan Habibie juga gagal. Penyebab kegagalan ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu *faktor internal* dan *faktor eksternal*. Dari faktor internal, sosok Habibie yang dipandang sebagai "pewaris Orde Baru" berpengaruh negatif dalam upaya produksi dan reproduksi makna publik. Apalagi, pengangkatan dirinya sebagai presiden terus diperdebatkan keabsahannya. Akibatnya, sebaik apapun pesan yang disampaikan lewat tema-tema dalam pembangunan wacana politiknya kurang, bahkan tidak, mendapatkan respons secara proporsional oleh publik, terutama oleh kelompok oposisi. Dari faktor eksternal, konteks-konteks yang mengiringinya hampir dipastikan tidak bisa mendukung upaya pembangunan wacana politik Habibie. Sebaliknya, justru mendukung opini publik. Misalnya, nilai rupiah yang terus merosot, harga kebutuhan pokok yang terus meninggi, kerusuhan yang terjadi di mana-mana, kasus pelanggaran HAM yang tidak terungkap, pengusutan KKN Soeharto dan kroninya yang tidak kunjung terbongkar, dan sebagainya. Se-

rangkaian konteks tersebut sangat berpengaruh pada penurunan citra diri Habibie dan legitimasi kekuasaannya.

Kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya Habibie untuk terus membangun wacana politik dalam rangka memperoleh legitimasi kekuasaan dari rakyat. Bahkan, ia melakukannya dengan tiga cara sekaligus, yaitu *cara simbolis* (dengan melakukan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang dianggap mewakili kelompok tertentu, baik yang pro maupun yang kontra), *cara prosedural* (dengan mengagendakan percepatan pelaksanaan SI dan pemilu, yang nantinya diharapkan bisa membuahakan ketetapan dan perundang-undangan yang bisa dipakai sebagai “pedoman kerja” presiden), dan *cara material* (dengan melaksanakan program populis dalam bentuk, misalnya, pemberian pinjaman lunak kepada rakyat kecil lewat KUT, JPS, serta padat karya). Namun, karena sejak semua legalitas pengangkatan Habibie dipermasalahkan oleh sebagian besar rakyat, maka upaya apa pun yang ditempuh Habibie dan konteks penunjang bagaimana pun tetap kurang -- bahkan tidak -- mendapatkan dukungan rakyat. Akibatnya, selain pemerintahan Habibie berjalan secara tidak fungsional; komunitas politik, hukum, lembaga politik, dan kebijakannya pun tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Dari sisi komunikasi pun terlihat bahwa hubungan komunikasi politik antara Habibie (sebagai suprastruktur) dan rakyat (sebagai infrastruktur)

mengalami distorsi. Setiap pesan politik yang disampaikan Habibie selalu direspons balik oleh rakyat. Hanya saja, respons yang disampaikan rakyat pada umumnya tidak sesuai dengan harapan Habibie, bahkan bersifat kontra produktif. Hal ini lebih dipicu oleh tuntutan perubahan yang mendasar dan multidimensional sebagai konsekuensi pemunculan era reformasi yang dibarengi dengan *euphoria* politik dalam bentuk 'kebebasan tanpa batas' oleh sebagian besar rakyat. Akibatnya, peran-peran kekuasaan Habibie dalam pemerintahan transisi terasa tidak berdaya menghadapi rakyat yang sudah 'lepas kendali' dan tidak mau 'diatur'.

8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil pembahasan yang dikaitkan dengan kajian teoretik pada Bab 7, dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

Secara teoretis, penelitian wacana politik Habibie hanya difokuskan pada wacana verbal yang terkemas dalam komunikasi politik. Kalau *toh* memperhatikan konteks, hanyalah sebatas sebagai penunjang analisis data. Dengan demikian, hasilnya pun hanya didasarkan pada data-data verbal yang ditemukan. Oleh karena itu, sekiranya ingin lebih mendalami persoalan wacana politik secara lebih komprehensif, perlu dilakukan penelitian lanjutan

yang diarahkan pada sasaran berikut, misalnya “hubungan antara wacana politik Habibie dan budaya politik”, “hubungan antara wacana politik dan sistem politik di Indonesia”, “perkembangan wacana politik di Indonesia”, dan “perbandingan wacana politik antarrezim”.

Secara empirik, hasil penelitian ini merupakan gambaran betapa sulitnya seorang elit kekuasaan (pemerintah) membangun wacana politik di tengah-tengah komunitas politik pada era transisional. Pada era ini kondisi sosial-politik mengalami perubahan drastis, baik orientasi maupun tatanan kehidupan di segala bidang, sehingga publik atau rakyat berkesempatan dan bebas untuk “berbeda” dengan elit kekuasaan. Apalagi pada era sebelumnya -- era Orde Baru, aspirasi dan kebebasan rakyat telah lama tersumbat. Pada kondisi yang demikian, seorang elit kekuasaan harus pandai-pandai menciptakan wacana politik yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan rakyat, kalau ingin mendapatkan legitimasi secara proporsional dari mereka.

Secara praksis sosial, hasil penelitian wacana politik dapat dipakai sebagai arahan untuk menentukan kebijakan publik. Dengan mengetahui respons publik terhadap wacana politik yang sedang berkembang, elit kekuasaan bisa menentukan langkah-langkah konkret yang patut dilakukan dalam rangka pelayanan publik, tanpa menyimpang dari koridor konstitusi yang telah ditetapkan bersama.

